

# Masjid sebagai Basis PENGELOLAAN ZAKAT



Gambar 1

PEMBERDAYAAN MASJID DALAM PENGELOLAAN ZIS



**Prof Dr KH Didin Hafidhuddin**  
Guru Besar IPB dan Ketua Umum BAZNAS



**Hilman Hakim**  
Alumnus IPB dan Kaprodi Ekonomi Islam UIKA Bogor

**M**asjid adalah institusi pertama yang dibangun Rasulullah SAW pada periode Madinah. Pendirian masjid pertama, bertariikh 12 Rabiul Awal Tahun Pertama Hijriah, yakni Masjid Quba yang terletak di Kota Madinah. Suatu masjid yang dipuji Allah SWT karena diniatkan sejak awal pendiriannya untuk membina jamaah muttaqin dan muthahhahirin. Sangat kontras dengan masjid dhirar yang didirikan untuk memporak-porandakan kesatuan mukminin dan menghalangi mereka dari perjuangan menegakkan agama Allah (QS At-Taubah: 107-108).

Dibangunnya masjid sebagai institusi pertama, yang kemudian dilanjutkan dengan membangun Masjid Nabawi, tentunya mempunyai nilai yang sangat strategis dan menentukan, dalam rangka menumbuhkembangkan masyarakat muslim yang mempunyai ciri-ciri antara lain: *ruhamaau baynahum* (QS Al-Fath: 29); seperti satu tubuh (*kaljasadil wahid*), senasib sepenanggungan dalam suka dan duka (HR Imam Bukhari).

Di Masjid itulah Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya melaksanakan kegiatan salat berjamaah, melakukan silaturahmi, komunikasi, interaksi, melakukan kegiatan proses belajar-mengajar, mengurus baytulmaal, menerima tamu, menyelesaikan perselisihan, menyusun taktik dan strategi peperangan, membuat perke-mahan (di halaman masjid) untuk mengurus prajurit yang terluka dalam peperangan, dan melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya (*Fiqh Sirah*, Said Ramadhan al-Nuthi, 1980).

Sidi Gazalba, dalam bukunya, *Masjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam*, telah merinci fungsi masjid di zaman Rasulullah SAW sebagai pusat ibadah untuk melakukan kegiatan pembinaan dan peningkatan kualitas umat, serta sebagai tempat ibadah untuk melakukan kegiatan seperti salat, berzikir dan beri'tikaf.

Dengan demikian, masjid di zaman Rasulullah SAW, para sahabat dan generasi berikutnya, memiliki fungsi-fungsi yang pada intinya perpaduan kegiatan ibadah (khusus) kepada Allah SWT dengan kegiatan muamalah, dan perpaduan kegiatan *hablumminallah* dengan *hablumminannaas*.

## Masjid dan kegiatan zakat

Di dalam Alquran Surat At-Taubah: 18, Allah SWT berfirman: *"Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk"*. Secara eksplisit maupun implisit, ayat ini menggambarkan bahwa memakmurkan masjid itu, di samping biasa melakukan salat di masjid, juga biasa menunaikan zakat. Jika kegiatan ini dimaksimalkan, maka masjid akan menjadi pusat kegiatan zakat yang memberikan kemakmuran, baik kepada jamaahnya, maupun kepada masyarakat lingkungannya.

Di samping itu, jamaah masjid dan masyarakat sekitar akan memiliki karakter positif sejalan dengan karakter yang dibangun oleh pembiasaan menunaikan zakat. Misalnya, jamaah masjid akan memiliki etos kerja yang tinggi, berusaha mencari rezeki yang halal, memiliki kecerdasan yang tinggi, dan memiliki rasa kasih sayang yang kuat, serta memiliki dana yang *cash* dan halal untuk kesejahteraan kaum dhuafa. Dan sangat dimungkinkan terjadinya kegiatan ekonomi mikro dengan jamaah masjid sebagai konsumen yang tetap.

Dalam perspektif UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, masjid akan dijadikan sebagai UPZ-BAZNAS (Unit Pengumpul Zakat-Badan Amil Zakat Nasional),

terutama tingkat kabupaten/kota. Meskipun demikian, dalam praktiknya, UPZ ini berfungsi pula mengelola zakat secara luas, yaitu pendataan muzakki dan mustahik, pengumpulan, pencatatan dan pendistribusian yang tepat sasaran dan sesuai dengan syariah Islamiyah. Dengan demikian, di samping sebagai pengumpul, UPZ Masjid ini juga mendapat mandat sebagai penyalur, dengan supervisi BAZNAS kabupaten/kota.

Salah satu hal yang penting, dengan mekanisme ini, zakat akan dikumpulkan dari muzakki suatu daerah dan diberikan kepada mustahik di daerah itu pula. Rasulullah SAW dalam pesannya kepada Muaz bin Jabal *"Bahwa zakat itu diambil dari orang kaya suatu daerah dan diberikan kepada orang fakir di daerah tersebut"*. Hal ini sejalan pula dengan bunyi dari Pasal 26 UU 23/2011 bahwa salah satu prinsip pengelolaan zakat adalah prinsip kewilayahan.

Isu sentralisasi zakat oleh BAZNAS yang selama ini banyak didengarkan oleh kalangan tertentu akan terjawab dengan sendirinya. Bahwa BAZNAS sama sekali tidak bermaksud memusatkan dana zakat masyarakat di tangan BAZNAS lalu disalurkan oleh BAZNAS sendiri berdasarkan program-programnya yang sudah ditentukan. Tetapi justru yang terjadi sebaliknya, yaitu desentralisasi, zakat di suatu daerah dihimpu-noleh UPZ-BAZNAS setempat dan langsung dikembalikan kepada masyarakat setempat itu juga. Dan inilah yang sesungguhnya terjadi sekarang juga, sejak BAZNAS berdiri tahun 2001 sampai dengan sekarang.

Yang dikehendaki oleh UU 23/2011 adalah semua kegiatan per-zakatan di Indonesia harus dikaitkan dengan BAZNAS, baik BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi, maupun BAZNAS Kabupaten/Kota. Dengan mekanisme ini diharapkan akan terjadi transparansi dalam pengertian yang seluas-luasnya. Masyarakat bisa melihat secara transparan jumlah dana zakat yang terkumpul dan proses serta daerah penyalurannya. Akuntabilitas dari pengelolaan zakat akan terlihat secara jelas.

Komitmen BAZNAS untuk meningkatkan akuntabilitas dan trans-

paransi tidak perlu diragukan. Secara kelembagaan, opini laporan keuangan BAZNAS Pusat adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sejak berdiri, dan mendapatkan penghargaan sertifikat manajemen mutu ISO 9001: 2008 sejak tahun 2008 sampai dengan sekarang. Mendapatkan penghargaan pula sebagai Lembaga Non Struktural Terbaik dalam Pelaporan Keuangan dari Departemen Keuangan tahun 2008. Dan pada tahun 2011 mendapatkan penghargaan sebagai Lembaga Zakat Paling Transparan dari IMZ (Indonesia Magnificence of Zakat).

## Menguatkan UPZ masjid

Seperti dikemukakan pada uraian sebelumnya, maka UPZ Masjid BAZNAS menjadi ujung tombak pengelolaan sekaligus pemberdayaan zakat bagi jamaah masjid, dan medium silaturahmi yang bersifat fungsional antara sesama jamaah masjid. Karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: Pertama, setiap BAZNAS Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Kementerian Agama, MUI, Dewan Masjid dan organisasi Islam lainnya, melakukan pendataan masjid-masjid yang dianggap potensial di suatu daerah, misalnya untuk tahap awal setiap kecamatan memiliki satu masjid yang dijadikan sebagai percontohan. Manajemen masjid-nya ditingkatkan, pendataan jamaah dilakukan, penyusunan program-program penghimpunan dan pendayagunaan, dan kemudian implementasi dari program itu terus-menerus ditingkatkan. Jika dalam kurun waktu tertentu hanya masjid di tingkat kecamatan, maka kemudian dapat diperluas dengan masjid di tingkat kelurahan/desa.

Kedua, setiap UPZ Masjid BAZNAS tersebut perlu melakukan pelatihan-pelatihan yang intensif berkaitan fiqh zakat, manajemen zakat, dan akuntansi zakat. Ketiga, perlu dirancang bangun hubungan dan keterkaitan setiap UPZ-BAZNAS Masjid antara satu daerah dengan daerah yang lain. Beberapa daerah kabupaten/kota seperti Kabupaten Sukabumi, Kota Bogor, Kota Padang dan Kota Balikpapan telah relatif berhasil dalam melakukan kegiatan pemberdayaan zakat melalui UPZ Masjid BAZNAS. Dan bisa dijadikan model untuk pemberdayaan zakat di kabupaten dan kota lainnya di seluruh Indonesia. *Wallahu a'lam.* ■



Musron/Republika

## TSAQOFI

### Dimensi Ekonomi Qurban



**Dr Irfan Syauqi Beik**  
Ketua Prodi Ekonomi Syariah FEM IPB

**S**alah satu karakteristik ibadah dalam ajaran Islam adalah setiap ibadah pasti memiliki sisi sosial ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehingga, manfaat suatu ibadah, bukan hanya dirasakan dalam konteks hubungan vertikal seorang hamba dengan Allah SWT, namun juga memiliki implikasi secara horizontal dengan sesama manusia. Beberapa ibadah bahkan memberi dampak ekonomi secara langsung (*direct effect*). Sebagai contoh adalah zakat dan ibadah haji, dimana pelaksanaan kedua ibadah tersebut secara langsung dapat menstimulasi kegiatan ekonomi dan bisnis masyarakat, mulai dari pemberian akses permodalan berbasis zakat produktif kepada kaum dhuafa untuk memulai usaha mereka, hingga industri transportasi, jasa komunikasi dan jasa layanan *catering* kepada jemaah haji.

Contoh ibadah lain, yang juga sangat istimewa, karena dilaksanakan pada hari yang sangat spesial, adalah ibadah qurban. Qurban adalah suatu ibadah yang sangat dicintai oleh Allah SWT, yang dilaksanakan mulai tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah. Secara spiritual, semangat berqurban mencerminkan ketundukan dan keridhoan terhadap segala ketentuan-Nya. Diharapkan, dampak dari ibadah qurban ini akan melahirkan pribadi yang memiliki komitmen dan semangat untuk mengorbankan segala yang dimiliki,

demi tegaknya kalimat Allah di muka bumi. Qurban merupakan salah satu jalan untuk meraih predikat taqwa, dan merupakan bentuk dari rasa syukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan (QS 108 : 1-2).

## Aspek ekonomi

Secara ekonomi, pelaksanaan ibadah qurban ini juga memiliki empat implikasi. Pertama, dari sisi *demand* dan *supply*. Pada sisi permintaan, ibadah qurban ini menjamin adanya permintaan terhadap hewan qurban, baik kambing/domba maupun sapi/kerbau. Bahkan permintaan ini memiliki kecenderungan untuk meningkat dari waktu ke waktu, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, serta peningkatan kesadaran masyarakat untuk menunaikan ibadah ini. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI Syukur Iwantonro menyatakan bahwa kenaikan permintaan hewan qurban pada tahun 1433 H ini bervariasi. Khusus wilayah Jabodetabek, kenaikan ini mencapai angka 10-15 persen.

Kondisi permintaan yang seperti ini memberikan sinyal kepada kita untuk melakukan penataan dari sisi *supply*. Sisi penawaran ini harus bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat, terutama industri peternakan rakyat yang notabene termasuk ke dalam kategori UMKM. Pertanyaannya sekarang, siapa yang lebih

menikmati kenaikan penjualan domba sapi selama ini? Inilah tantangan besar bagi umat ini, bagaimana caranya agar penjualan domba dan sapi ini lebih banyak dinikmati oleh umat.

Kedua, dari sisi ketahanan ekonomi. Ibadah qurban ini bisa menjadi instrumen untuk menjaga keseimbangan perekonomian domestik dalam menghadapi tekanan krisis global. Tentu saja dengan catatan bahwa hewan qurban tersebut merupakan hasil produksi dalam negeri. Jika pasokan hewan qurban tersebut berasal dari impor, maka yang akan menikmati adalah perekonomian negara eksportir hewan qurban. Permintaan domestik yang tinggi, akan sangat menguntungkan negara mereka, seperti Australia yang menjadi eksportir sapi terbesar ke tanah air. Oleh karena itu, perlu dipikirkan secara lebih serius, bagaimana caranya meningkatkan produksi dalam negeri, sehingga pengadaan hewan qurban ini bisa dipenuhi oleh para peternak lokal.

Salah satunya adalah dengan membangun dan mengembangkan sentra industri peternakan rakyat. Beberapa upaya lembaga zakat, baik BAZNAS dan LAZ, untuk membangun sentra usaha ternak yang dikelola oleh kaum dhuafa, perlu didukung. Keberadaan sentra-sentra ini harus diperbanyak, dan kelompok masyarakat calon pequrban perlu didorong untuk membeli dari ternak usaha rakyat tersebut. Jika usaha membangun sentra

peternakan rakyat ini mengalami kendala permodalan, maka perbank syariah dapat ikut terlibat dalam pembiayaannya. Untuk itu, inovasi model bisnis yang menguntungkan semua pihak perlu diciptakan.

Ketiga, qurban dapat membantu memperkuat ketahanan pangan nasional, dimana kelompok dhuafa mendapatkan tambahan pasokan daging yang siap dikonsumsi. Meskipun sifatnya sangat temporer, tapi paling tidak, qurban ini diharapkan dapat meningkatkan konsumsi daging per kapita masyarakat, yang saat ini baru mencapai angka tujuh kilogram per kapita per tahun. Masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan konsumsi daging warga Malaysia yang mencapai angka 44 kg per kapita per tahun. Rendahnya konsumsi daging ini antara lain disebabkan oleh banyaknya jumlah warga yang tidak memiliki kemampuan untuk membeli daging. Dengan qurban, minimal mereka memiliki kesempatan untuk mengkonsumsi daging. Keempat, qurban dapat meningkatkan produktivitas perekonomian. Semangat berqurban akan melahirkan pribadi-pribadi yang produktif. Jika tidak produktif, maka seseorang tidak mungkin memiliki kemampuan untuk berqurban. Produktivitas individu dan masyarakat merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam upaya membangun peradaban ekonomi syariah. *Wallahu a'lam.* ■

# Bisnis Halal Global dan Tantangan bagi Produsen Indonesia



Prof Dr E Gumbira-Sa'id  
Guru Besar Fateta IPB



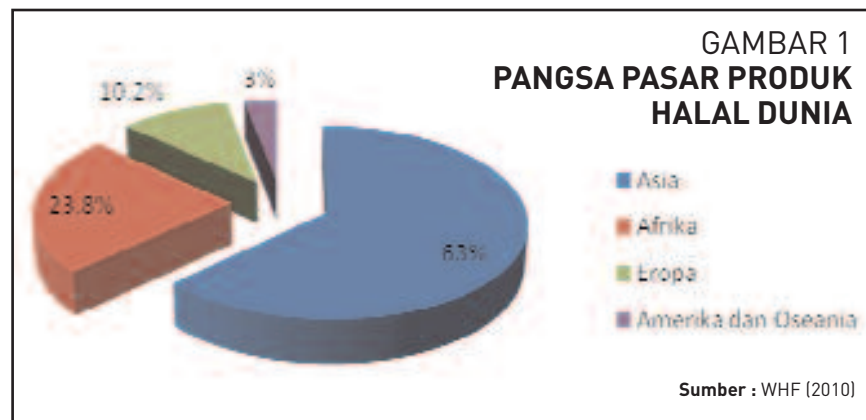
Dwi Purnomo  
Dosen Fakultas Teknologi Industri Pertanian Unpad

**G**lobalisasi sistem perdagangan yang berjalan dengan cepat menyebabkan terjadinya perubahan, baik dalam segi persaingan global, maupun dalam perubahan perilaku ataupun paradigma dan kinerja produsen maupun konsumen. Selain itu, paradigma masyarakat yang senantiasa berubah telah menyebabkan meningkatnya permintaan jaminan dan perlindungan atas produk yang dikonsumsi menjadi tuntutan yang tidak dapat dielakkan lagi. Tuntutan akan standar mutu produk yang tinggi yang menjamin keamanan dan asal-usul produk menjadi perhatian yang tinggi dari masyarakat internasional pada saat ini. Di lain pihak, komunitas muslim internasional juga semakin kritis dan meminta jaminan yang tinggi akan kehalalan maupun mutu produk yang akan dikonsumsi.

Oleh karena itu, persyaratan halal menjadi semakin penting untuk dipenuhi, karena pasar kelompok pangan halal saja telah melibatkan sekitar 150 negara, yang besaran total konsumsi masyarakat Muslim saja nilainya mencapai sekitar US\$ 800 Miliar per tahun, serta menghasilkan aktivitas perdagangan halal internasional sebesar USD 250 Miliar per tahun (Purnomo *et al*, 2011). Dari tahun ke tahun nilai pasar halal menunjukkan perkembangan yang pesat. Pangsa pasar produk halal saat ini sudah mencapai 16 persen dari pasar produk makanan dunia. Sebesar 63 persen produk halal global diperdagangkan di pasar Asia, 23,8 persen di kawasan Afrika, 10,2 persen di kawasan Eropa dan sisanya di Amerika dan Oseania (WHF, 2010).

Dari pengkajian tren bisnis halal yang meningkat, terutama di Timur Tengah dan Asia, para pelaku bisnis global yang merupakan perusahaan-perusahaan multinasional, seperti Nestle, KFC, Mc Donald's, Coca Cola, Pizza Hut dan lain-lain dengan cerdas memanfaatkan bisnis yang sangat menggiurkan tersebut (Gumbira-Sa'id 2008). Bahkan dalam empat tahun terakhir, dari arena pameran-pameran pangan internasional, khususnya di pameran Malaysian International Halal Showcase (MIHAS) jumlah dan keragaman produk-produk pangan yang telah mendapatkan sertifikasi halal juga semakin meningkat jumlah, maupun produsennya.

Perkembangan bisnis halal dalam perspektif bukan saja halal secara



syariah, tetapi mempersyaratkan standar mutu yang tinggi telah meningkat dengan pesat. Hal ini secara nyata dapat dideteksi dari volume perdagangan produk halal, jumlah negara yang terlibat dalam bisnis halal, tingkat kesadaran konsumen internasional, keterlibatan perusahaan-perusahaan multinasional dan lokal di setiap negara dalam memproduksi produk halal serta kenaikan presentase bisnis halal dalam bisnis internasional, yang secara umum menunjukkan bahwa, bisnis halal telah menjadi bagian penting dari bisnis global, terutama dalam hal produk-produk makanan dan *Fast Moving Consumer Goods* yang sudah mulai diterima masyarakat global sebagai produk yang memiliki mutu yang baik.

Perkembangan pasar halal juga didorong oleh meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya mutu dan keamanan produk yang dikonsumsi. Terdapat pergeseran persepsi konsumen atas konsepsi halal yang tidak lagi dipertimbangkan murni hanya karena masalah keagamaan, melainkan menjadi simbol global untuk jaminan mutu dan pilihan gaya hidup. Halal yang mengakomodasi kebutuhan konsumen mulai diakui sebagai tolak ukur baru untuk keamanan yang kemudian berkembang menjadi arena pasar yang paling menguntungkan dan berpengaruh. Lebih jauh lagi bisnis halal tidak hanya mencakup kelompok produk pangan, namun juga kelompok produk non-pangan, jasa halal dan bahkan sistem keuangan halal.

Isu-isu dan peristiwa internasional yang terkait keamanan, kebersihan dan jaminan mutu produk turut juga membangkitkan kesadaran konsumen yang semakin sadar dan menyebabkan tuntutan menjadi tidak dapat ditoleransi lagi. Rangkaian peristiwa-peristiwa geopolitik, masalah kepentingan umum, makanan yang

sehat dan aman serta permintaan konsumen secara keseluruhan telah mendorong isu halal sebagai isu utama mutu, harga produk dan preferensi konsumen.

Dengan demikian, para produsen di seluruh dunia berlomba untuk memanfaatkan potensi belanja dua miliar konsumen Muslim di seluruh dunia. Secara internasional nilai bisnis halal yang semakin membesar juga berpengaruh pada perilaku konsumen global yang semakin terbuka menerima terminologi halal sebagai produk yang memiliki mutu yang tinggi sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan diterima sebagai produk global (Purnomo *et al*, 2011).

Lebih menarik lagi karena komunitas Muslim bukanlah satu-satunya komunitas yang mengkonsumsi produk halal, tetapi telah merambah ke komunitas lain yang mengenal halal sebagai produk yang memiliki mutu yang tinggi. Selain di negara-negara Islam, pasar halal di Eropa juga berkembang dengan cukup signifikan, yakni dengan jumlah penduduk muslim sekitar 57 juta jiwa dan dengan kemampuan ekonomi yang cukup baik. Ketertarikan terhadap produk halal juga telah meluas hingga kalangan non-muslim. Pada negara-negara non-muslim, pasar utama pangan halal dunia terdapat di India (dengan populasi penduduk muslim sekitar 248 juta jiwa), Perancis (6 juta muslim), Republik Rakyat Cina (RRC) (134 juta muslim), Jerman (4,1 juta muslim), Amerika Serikat (6,6 juta muslim), Inggris (2,1 juta muslim), Filipina (10 juta muslim), dan Kanada (1 juta muslim).

Negara-negara Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru adalah negara-negara pengespor produk bersertifikat halal yang memiliki orientasi yang tinggi terhadap mutu. Perkembangannya

juga diindikasikan dengan kesediaan supermarket besar di Eropa untuk mengambil peluang bisnis pada produk halal lain selain daging, seperti produk pangan olahan kemasan, makanan siap saji, makanan ringan, minuman, produk *toileteries*, kosmetik dan produk-produk kesehatan. Di luar negara-negara di atas yang menetapkan posisi harga yang relatif tinggi, Brazil, India, China dan Russia merupakan negara-negara eksportir produk halal raksasa dunia yang berorientasi pada harga yang rendah (Dahlan, 2009).

Di wilayah Asia Tenggara (ASEAN), Malaysia dan Thailand merupakan negara-negara yang sangat aktif dalam memanfaatkan peluang pasar halal global. ASEAN dipelopori Malaysia berkembang sebagai pusat produksi dan pemasaran produk halal global yang dilakukan dengan kerjasama antar negara ASEAN atau dikenal sebagai *ASEAN Halal-Hub* dimana Malaysia memposisikan diri menjadi satu-satunya pintu bagi seluruh produk makanan halal yang hendak dipasarkan oleh negara-negara yang lain.

Oleh karena itu, fakta di atas menjadi tantangan besar bagi Indonesia, untuk menjadikan bisnis halal sebagai landasan pengembangan industri agronya, karena Indonesia memiliki sumberdaya agro yang sangat baik, dan merupakan pasar produk halal yang sangat besar. Seharusnya, kekuatan yang dimiliki Indonesia tersebut dapat dijadikan peluang untuk dapat memperkuat kemampuan kompetitif industri agronya dalam menghasilkan produk-produk bermutu tinggi serta melindungi pasar domestik dari serangan produk asing (*non-tariff barrier*). Di lain pihak, dalam jangka panjang Indonesia diharapkan mampu memanfaatkan peluang pasar global sebagai produsen produk halal unggulan.

Para pelaku kepentingan industri agro, dimotori oleh pemerintah Indonesia seyogianya segera berkonsolidasi untuk memberdayakan segenap potensi yang ada untuk bersinergi merumuskan kebijakan yang tepat sebagai tindakan antisipatif dan strategis dalam pengembangan produk halal nasional sehingga memberikan manfaat baik secara sosial maupun ekonomis. Hal ini terutama harus segera dilakukan agar Indonesia tidak hanya sekedar pasar terbesar, namun juga pelaku utama produsen produk halal terbesar di dunia. *Wallahu a'lam.* ■

## TAMKINIA

## Islam Memuliakan Kaum Pekerja



Dr Mukhamad Najib  
Wakil Kepala Pusat Studi Bisnis dan Ekonomi Syariah (CIBEST) IPB

**B**aru-baru ini demo pekerja secara massif terjadi di berbagai kota. Kali ini para pekerja mempermasalahkan sistem outsourcing yang marak diterapkan perusahaan. Beberapa permasalahan dari sistem outsourcing bagi pekerja antara lain: status ketenagakerjaan yang tidak pasti, adanya perbedaan kompensasi dan *benefit* antara tenaga kerja internal dengan tenaga kerja outsourcing, *career path* dari outsourcing kurang terencana dan kurang terarah, para pihak pengguna jasa dapat memungkinkan melakukan pemutusan hubungan kerjasama dengan pihak outsourcing provider secara sepihak sehingga dapat mengikabkannya status mereka menjadi tidak jelas.

Meski dalam perspektif pekerja sistem outsourcing lebih banyak merugikan, namun dalam perspektif perusahaan, sistem ini memiliki beberapa keuntungan, antara lain: perusahaan dapat lebih fokus kepada *core business*-nya, dapat mengurangi biaya, mengubah biaya investasi menjadi biaya belanja, perusahaan tidak dipusingkan jika terjadi *turn over* tenaga kerja. Ketika para pekerja menggugat undang-undang yang memungkinkan dilakukannya sistem outsourcing ke Mahkamah Konsultasi, lembaga ini justru tidak mempermasalahkan sistem outsourcing, malah menganggapnya sebagai sebuah kewajaran dalam bisnis.

### Perseteruan abadi

Sebenarnya, jika kita melihat realitas lebih jernih dari persoalan ketenagakerjaan kita, outsourcing hanyalah bagian dari atribut-atribut luar dari masalah yang lebih fundamental mengenai hubungan antara buruh dan majikan. Mogok kerja pada 3 Oktober lalu hanyalah salah satu refleksi dari hubungan antara pemilik modal dan pekerja yang masih belum menemukan titik harmonisasi yang optimal.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pekerja dan pengusaha di Indonesia sering kali gagal memperoleh titik temu mengenai kepentingan bersama yang harus dijaga. Masalah kritis yang sering terjadi adalah sulitnya mencari equilibrium antara hak-hak dasar pekerja yang harus dipenuhi dan kepentingan pemilik modal yang tidak boleh gagal. Sayangnya intervensi pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalah, justru ter-

kadang menimbulkan masalah-masalah baru seperti yang terjadi pada sistem outsourcing yang ditolak pekerja ini.

Perspektif kapitalis yang menjadikan pemilik modal sebagai pemegang kedaulatan tertinggi perusahaan sering kali melahirkan dilema ketika dihadapkan pada tuntutan kesejahteraan pekerja. Di satu sisi kapitalisme mengajarkan pengusaha untuk berfikir bagaimana memaksimalkan profit di sisi lain pekerja berfikir bagaimana memaksimalkan kesejahteraan mereka. Hal ini menjadi sulit bertemu karena dalam perspektif kapitalis pekerja adalah alat produksi yang harus dimaksimalkan penggunaannya dengan *maintenance cost* yang serendah mungkin. Agar tujuan memaksimalkan keuntungan dapat dicapai.

Kontradiksi orientasi antara pekerja dan pengusaha yang diabaikan berlalu-rurut dapat membawa perusahaan pada situasi *declining performance* (David, 2001). Demo pekerja yang diikuti oleh mogok kerja jelas akan menyebabkan proses produksi terganggu yang dalam jangka panjang dapat berpengaruh pada terganggunya sistem perekonomian yang lebih luas. Oleh karena itu harus segera ditemukan jalan keluar yang adil bagi kedua belah pihak, dimana kesepakatan harus dibangun diatas sistem nilai yang benar dan hasilnya bisa dilaksanakan dan diawasi pelaksanaannya secara ketat dan jujur. Jika hal ini tidak bisa dilakukan, maka kontradiksi kepentingan pekerja dan perusahaan akan menjadi perseteruan abadi yang merugikan semua pihak.

### Pekerja sebagai ujung tombak

Pada awal perkembangannya korporasi hanya mengenal istilah pemilik (owner). Saat ini konsep korporasi telah berkembang. Keberadaan organisasi harus dipandang dari kepentingan dua kelompok yaitu *shareholder* dan *stakeholder*. Istilah *stakeholder* pertama kali diperkenalkan dalam Stanford Research Institute Internal Report pada 1963 dan kemudian pada era 1980-an mulai dielaborasi secara sistematis dalam diskursus *corporate governance*. Khususnya sejak RE Freeman (1984) menerbitkan bukunya "*Strategic Management: A Stakeholder Approach*".

Dalam bukunya Freeman mendefi-

niskan *stakeholder* sebagai setiap kelompok atau individu yang dapat memberi pengaruh atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Dalam konteks perusahaan pihak yang sangat berperan mempengaruhi tercapainya tujuan pokok perusahaan tentunya para pekerja (eksekutif dan non-eksekutif). Pekerja adalah ujung tombak dimana tanpa mereka perusahaan sama sekali tak akan dapat melakukan fungsinya dan otomotif tujuan perusahaan tak akan dapat diwujudkan. Sayangnya, pekerja, khususnya non-eksekutif, dalam realitas empirik saat ini sering kali hanya menjadi kelompok marginal yang jauh dari posisi ideal sebagai *stakeholders* di mata pengusaha.

Sistem outsourcing dapat dipandang sebagai upaya pengusaha dalam menjaga jarak dan menjauhkan pekerjanya dari ikatan langsung berkesinambungan. Dengan berbagai mekanisme yang dilegitimasi oleh regulasi saat ini maka posisi pekerja non-eksekutif dihilangkan eksistensinya sebagai pemangku kepentingan utama dalam perusahaan. Kondisi ini menyebabkan perusahaan tumbuh dalam situasi keterasingan dengan para pekerjanya. Pemilik modal semakin makmur, sementara pekerja terus dihimpih keterbatasan.

### Kaum pekerja dalam Islam

Islam sesungguhnya sangat memuliakan kaum pekerja. Pekerja dalam Islam memiliki hak-hak dasar yang harus dihargai dan dipenuhi oleh pengusaha, yaitu hak atas kesejahteraan, hak merdeka dari eksploitasi, hak atas persamaan derajat kemanusiaan dan hak persaudaraan. Kita bisa menyimak bagaimana Islam memuliakan kaum pekerja ketika Rasulullah saw mengatakan: "*Kepada pekerja, berilah makan mereka dari apa yang kalian makan; berilah pakaian mereka dengan pakaian seperti yang kalian pakai; janganlah kalian membebani mereka sesuatu yang tidak mampu dijalankan oleh mereka. Jika kalian terpaksa membebani mereka sesuatu yang memberatkan mereka maka bantulah mereka*" (HR. Bukhari).

Perkataan Rasulullah SAW diatas jelas sekali menghendaki adanya persamaan derajat atau kedudukan yang sejajar antara pekerja dan pengusaha. Hadits tersebut juga memberikan perlin-

dungan kepada pekerja dari eksploitasi oleh pengusaha. Lebih dari itu, Islam juga memuliakan pekerja dengan memberikan perlindungan atas hak kesehatannya. Hal ini dapat dilihat dari hadits Rasulullah SAW yang mengatakan: "*Ada tiga orang, yang akan menjadi musuh-Ku pada hari kiamat: ... orang yang mempekerjakan seorang buruh, si buruh memenuhi tugasnya, namun dia tidak memberikan upahnya yang sesuai.*" (HR. Bukhari dan Ibn Majah). Di Hadits yang lain Rasulullah mengatakan: "*Berikanlah upah pegawai (buruh), sebelum kering keringatnya.*" (HR. Ibn Majah)

Meski Islam memuliakan kaum pekerja, bukan berarti pekerja adalah segalanya sehingga dapat menuntut apa saja pada pengusaha. Islam menempatkan pengusaha dan pekerja dalam kedudukan yang setara. Keduanya adalah mitra dalam bekerja di mana pengusaha adalah pemilik dana yang membutuhkan tenaga pekerja. Sementara pekerja adalah pemilik tenaga yang memerlukan dana. Keduanya saling membutuhkan karenanya harus diatur agar masing-masing dari keduanya menjalankan tugasnya dengan baik dan mendapatkan bagiannya secara benar.

Allah swt berfirman: "*Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan*" (QS. al-Zukhruf/43: 32).

Mindset pengusaha dan pekerja harus disamakan segera, bahwa mereka adalah para pihak yang wajib bekerjasama untuk menentukan masa depan yang saling mensejahterakan. Mereka sama sekali bukanlah dua pihak yang harus saling berhadapan, saling mengeksploitasi atau saling mengancam. Sejahtera bersama harus menjadi kunci dari kemajuan sebuah perusahaan. Pengusaha harus dengan tulus menghargai pekerja dan menginginkan mereka hidup sejahtera, sementara pekerja juga harus lebih menghormati pengusaha dan selalu menghormati mereka memperoleh keuntungan atas usahanya. *Wallahu a'lam.* ■

# Mendayagunakan Ekonomi Syariah UNTUK PERTANIAN



**Laily Dwi Arsyianti**  
Dosen Prodi Ekonomi Syariah  
FEM IPB

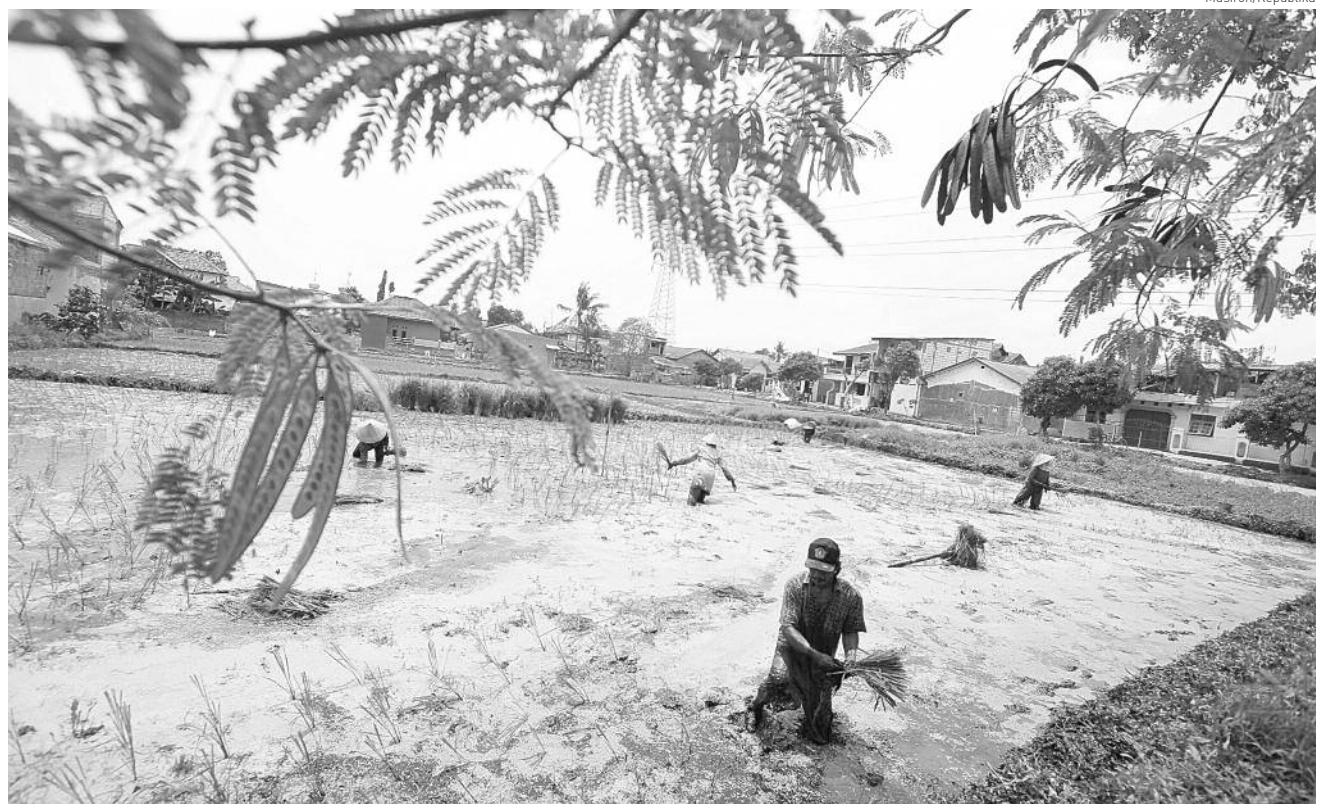
Jika dilihat dari sisi *supply*, perbankan mempunyai beberapa pertimbangan untuk menyalurkan pembiayaan kepada sektor pertanian, di antaranya adalah pertanian masih dianggap sebagai suatu sektor yang memiliki risiko yang tinggi. Sektor pertanian memang masih sangat bergantung dengan faktor alam atau faktor yang berada di luar kuasa manusia. Hal ini terkait juga dengan keterbatasan ilmu dan sumberdaya yang dimiliki, dimana belum ada teknologi atau metode yang mampu merekayasa secara tepat curah hujan atau keadaan alam yang dibutuhkan pertanian.

Risiko ini juga diikuti dengan keterbatasan sumberdaya manusia yang memahami industri ini. Entah dikarenakan oleh ketidakmauan, ketidakpedulian ataupun terputusnya rangkaian ilmu pertanian di dalam keluarga petani sehingga kemanfaatannya pun tidak dapat dirasakan. Hal ini dapat menjadikan jumlah lahan pertanian yang bertransformasi menjadi lahan non pertanian pun semakin meningkat. Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebutkan, dalam kurun waktu 2004-2009, alih fungsi lahan pertanian di Indonesia mencapai angka 15.999,60 hektare, dengan kata lain, rata-rata seluas 3.199,92 hektare per tahun. Sementara, alih fungsi untuk industri dan perumahan mencapai sekitar 6.000 hektare. Dalam kurun waktu 30 tahun, sebagian besar lahan sawah beralih fungsi menjadi perumahan (58,7 persen), non-sawah (21 persen), dan lainnya (19,5 persen).

Tuntutan biaya modal yang bersaing serta biaya operasional yang besar turut menjadi bahan pertimbangan perbankan selain kriteria umum 5C (*Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *Collateral* (jaminan), *Capital* (modal), dan *Condition* (situasi dan kondisi)). Sehingga, tidak mengagetkan jika persentase pembiayaan perbankan secara umum untuk sektor pertanian pun semakin menurun, meskipun secara nominal nilainya meningkat (lihat Tabel 1).

Di sisi lain, permintaan terhadap pembiayaan di sektor pertanian sangat dibutuhkan karena sektor inilah yang menopang kebutuhan pangan manusia. Selama manusia masih membutuhkan makanan untuk hidup, selama itu pula sektor pertanian dibutuhkan. Sektor ini pula yang menopang kehidupan 36,54 juta tenaga kerja. Dari segi lahan, para petani di Indonesia pun mengalami penurunan kepemilikan lahan. Jika di Amerika Serikat seorang petani memiliki 80 hektare, maka petani Indonesia hanya memiliki 0,35 hektare.

Permasalahan lain yang dihadapi dari sisi *demand* adalah akses terhadap modal. Agar dapat terus berproduksi, maka petani membutuhkan modal. Karena pada akhirnya yang merasakan hasil taninya adalah termasuk para pemilik modal, maka sudah seharusnya para pemilik modal



memberikan akses yang lebih terbuka untuk para petani ini. Skema pembiayaan mikro (*microfinance*) merupakan salah satu upaya yang dapat masuk ke dalam jalur pertanian. Dengan demikian, beruntunglah Indonesia masih memiliki BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dan Koperasi Syariah yang lebih dekat ke petani. Hal ini telah dibuktikan dengan, di saat perbankan pada umumnya mengurangi pembiayaan di sektor pertanian, pembiayaan ke sektor pertanian oleh BPRS mengalami peningkatan (lihat Tabel 2).

## Keberpihakan semua elemen

Seharusnya, sektor penyumbang sekitar 15 persen PDB (Produk Domestik Bruto) tahun 2011 ini dapat lebih berkembang. Namun, kontribusi para pemilik modal masih menjadi masalah, baik itu belum ditemukannya model yang tepat untuk penyaluran dana di sektor pertanian untuk meminimalkan risiko maupun masalah sosial seperti masih tingginya biaya transaksi sektor ini. Islam telah mengistimewakan akad salam untuk dapat dipraktikkan dalam bidang pertanian di antara akad-akad *future* lainnya yang dilarang. Tentu ada hikmah yang perlu kita gali dan kita manfaatkan untuk dapat melaksanakannya.

Salam sangat membantu petani untuk memulai proses penanaman. Namun, jika terjadi gagal panen, maka petani tetap harus menanggung yang sudah dijanjikan kepada pembelinya (pemilik modal). Demikian pula jika terjadi paralel salam, maka penjual bertanggung jawab memberikan yang sudah dijanjikan. Tidak semua pemilik modal tertarik untuk berinvestasi dengan skema yang demikian, terlalu banyak risiko yang perlu dipertimbangkan.

Tabel 1. Total Kredit Perbankan untuk Pertanian

Tahun	Nilai Kredit (Rp triliun)	Prosentase terhadap Total Kredit (%)
2009	77,412	5,69
2010	90,999	5,43
2011	114,725	5,50
2012	117,519	5,33

Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Tabel 2. Total Pembiayaan BPRS untuk Pertanian

Tahun	Nilai Pembiayaan (Rp miliar)	Prosentase terhadap Total Kredit (%)
2009	54,486	3,43
2010	107,129	5,20
2011	223,986	8,37
2012	245,266	8,70

Sumber : Bank Indonesia (diolah)

Di sinilah dituntut keterlibatan semua elemen mulai dari pemerintah hingga di tingkat rumah tangga petani. Pemerintah perlu menjadi penjamin ketersediaan pangan atau penolong bagi petani yang kesulitan berhadapan dengan risiko gagal panen. Hal ini sudah dilakukan, seperti sistem resi gudang, namun belum optimal, mengingat ternyata masih sangat jarang yang mau bertransaksi dengan akad salam karena masih adanya risiko tersebut. Sudah saatnya pemerintah mulai melirik potensi zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) untuk didayagunakan mendukung sektor pertanian dan menopang risiko tersebut karena dana ini tidak bersifat investasi dunia yang diharapkan oleh pemberi dana untuk dapat menghasilkan sesuatu bagi mereka. Dengan ZISWAF, peme-

rintah dapat melakukan pembinaan, pelatihan, dan pembimbingan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani sehingga mampu meminimalisir risiko.

Selain itu, kalangan pelajar dan mahasiswa juga diharapkan diikutsertakan dalam membina, melatih, dan membimbing para petani sehingga generasi muda mampu berbagi dan merasakan kehidupan petani. Terutama bagi mahasiswa yang berpengetahuan bidang pertanian. Hal ini juga dibutuhkan untuk mengubah paradigma berpikir terutama pemikiran negatif tentang petani. Bahkan peran serta dari setiap anggota keluarga petani sangat dibutuhkan untuk menjaga pola pikir bahwa masyarakat sangat membutuhkan pangan sehingga tidak dengan mudah menjual lahan pertanian. *Wallahu a'lam.* ■

## RESENSI

# Mengapa Ekonomi Makro Menjadi Seperti Sekarang Ini?

Inilah pertanyaan yang cukup mengusik para ekonom ketika mendalami ekonomi makro. Inilah pertanyaan untuk menjawab beberapa permasalahan dalam ekonomi makro dalam rangka meng'islam'kan ekonomi makro. Ini pulalah pertanyaan yang menginspirasi Hendri Tanjung, Ph.D dan Profesor Hermanto Siregar, Ph.D untuk menulis buku yang berjudul "Macroeconomics An Evolutionary approach" yang diterbitkan oleh IPB Press September 2012 dalam bahasa Inggris.

Dalam komentarnya terhadap buku ini, Profesor Bambang P.S. Brodjonegoro, Ph.D, ketua umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), mantan direktur IRTI Islamic Development Bank Jeddah, yang juga sebagai Kepala Badan Keijkakan Fiskal Kementerian Keuangan Republik Indonesia, mengatakan : " Macroeconomics is a dynamic science, always changing to reflect the shifting trends in economic affairs, in the environment, in the world economy, and in society at large. In accordance with that, this book uses the approach of evolutionary to cover the evolvement and development in macroeconomics. It is written comprehensively by well known economists that make it effective as a teaching instrument,useful as a guide to policymakers and their advisors, and essential reading for students with a keen interest in macroeconomics".

Dari judulnya, "Macroeconomics An Evolutionary approach", buku ini berisi survei komprehensif terhadap pemikiran ekonomi, dari era sebelum Adam Smith

hingga era sekarang ini. Pertanyaan penting yang berusaha untuk dijawab dalam buku ini adalah "Bagaimana makroekonomi berfungsi dalam suatu negara?"

Buku ini dimulai dari eksposisi classical economics, Keynesian, Neo classical-Keynesian (Synthesis), Monetarism, New Classical Revolution, hingga New Macroeconomics. Tiga paradigma pertama menerapkan teori Hegelian, yang kemudian menjadi ortodoks secara alamiah. Ketiga paradigma ini saling menggantikan satu sama lain. Tiga paradigma terakhir merupakan perbaikan lebih lanjut dari tiga pertama, namun masih dalam rangka pengembangan dari tiga paradigma pertama, bukan revolusi.

Kronologis Buku ini membahas seperangkat pasar yang terlibat dalam ekuilibrium umum, yaitu pasar tenaga kerja, pasar uang, pasar barang dan pasar obligasi. Cara penyajiannya unik, yakni membahas secara jelas perpindahan dari satu paradigma ke paradigma yang lain.

Buku ini terdiri dari 9 bab, diawali dengan pengantar dari dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) IPB dan pengantar penulis. Bab satu membahas revolusi dalam ekonomi, dimulai dari revolusi pertama: classical economics, kemudian Keynes/keynesian economics, monetaris dan New Classical Revolution (NCR). Bab dua membahas classical economics, mencakup supply side, demand side, complete model of classical economics, implication of classical system dan critique of classical system. Bab tiga membahas Keynesian model, mencakup

supply side dan demand side of hydraulic model, dan appraisal. Bab empat membahas Neo-classical-keynesian (Synthesis) yang mencakup format model, Pigou criticism on Keynes, Quasi-theoretical and empirical objections on Pigou effect, the synthesis general form dan checking neutrality of money.

Bab lima membahas General disequilibrium model, mencakup basic features of Leijonhufvud dan Clower, Synthesis, serta central theme: patinkin and Clower case. Bab enam membahas Monetarisme yang dimulai dengan cerita munculnya mazhab monetarisme, speculative demand, Substitution Effect and Income Effect serta empirical evidence on Monetarism. Bab tujuh membahas New Classical Revolution (NCR) dengan tema besarnya Rational Expectation. Bab ini membahas policy failure and expectation, Rejecting Keynesian (Lipsey reaction function, Friedman, Phelps, Lucas, Sargent and Wallace), dan implication of NCR.

Bab delapan membahas New Macro economics, mencakup four tenets of new macroeconomics, three dimensional focuses on the research post NCR (Rational expectations, Policy irrelevance, and reconstruction of New Keynesian Models). Bab terakhir membahas Rival theories of Business Cycle mencakup The real business cycle, the New Keynesian, dan monetary business cycle theory, serta open economy models.

Terdiri dari 266 halaman, memuat 95 gambar dan grafik, puluhan persamaan (equations), dilengkapi dengan

name index dan subject index, buku ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan text book makroekonomi bagi mahasiswa pascasarjana di bidang ekonomi serta para profesional.

Penulis buku ini merupakan panel ekonom yang telah berurusan dalam hal ekonomi makro tidak hanya dalam teori, tetapi juga dalam praktek. Hendri Tanjung adalah dosen senior di Universitas Ibn Khaldun Bogor, yang mengajar Makroekonomi di fakultas manajemen sains di International Islamic University Islamabad, Pakistan. Hermanto Siregar yang merupakan profesor ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor (IPB), saat ini juga anggota Komite Ekonomi Nasional, sebuah dewan penasihat ekonomi kepada Presiden Republik Indonesia. Pada saat ini, ia juga komisaris Bank BRI, bank terbesar di Indonesia.

Profesor Bustanul Arifin, guru besar ekonomi pertanian Universitas Lampung (UNILA) dan ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Jakarta, mengapresiasi buku ini dengan mengatakan "This textbook provides a comprehensive and systematic treatise on macroeconomics in an accessible and readable form. The authors have shown that the entire scope of modern theory and some empirical evidence of macroeconomics can be brought into both classroom teaching and public policy discussion. The book is strongly recommended for academics, business, and policy makers both in developed and developing countries". *Wallahu a'lam.* ■



**Dr Hendri Tanjung**  
Alumnus IPB dan Sekretaris  
Magister Ekonomi Islam  
UIKA Bogor

